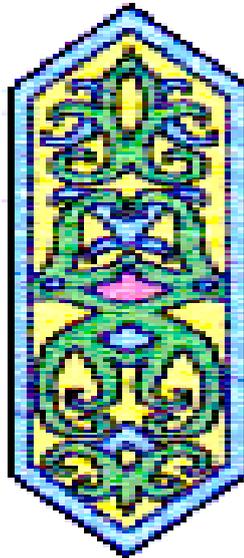




**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
SKPD DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mayjen DI Panjaitan No. 4 Telepon/Fax. (0536) 3221295
Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dapat disusun dan selanjutnya untuk dibahas bersama secara mendalam dan menyeluruh untuk kelengkapan dan penyempurnaannya sebelum ditetapkan sebagai Renstra Final.

Sesuai dengan Pasal 15 Ayat 3 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan bagian secara integral dan tidak dapat dipisahkan dari RPJMD, maka Rencana Strategis SKPD ini merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk lima tahun dan merupakan bagian yang sinergis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Program, Kegiatan, Kebijakan, Strategi, Tujuan, Visi dan Misi yang dimuat dalam dokumen ini diharapkan merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Oleh sebab itu dokumen perencanaan ini dapat menjadi arah dan pedoman untuk menyusun Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Demikian Rencana Strategis ini, semoga Allah SWT selalu menyertai segala upaya kita dalam mencerdaskan bangsa secara khusus pendidikan di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Maret 2017

Kepala Dinas,

Drs. H. NURUL EDY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198803 1 005

DAFTAR ISI
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	19
2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	40
BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra Kemdikbud Tahun 2016-2021.....	49
3.4 Telaahan RTRWP dan Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	55
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	60
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	63
4.3 Strategis dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	72

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan	78
5.2	Rencana Program Penunjang Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Inikatif Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.....	94
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
6.1	Indikator Kinerja.....	95
BAB VII	PENUTUP	
7.1	Kesimpulan.....	100
7.2	Kaidah Transisi	101
7.3	Kaidah Pelaksana.....	101

PENDAHULUAN

BAB. I

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan Visi, Misi dan Program Pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni *(a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan Isu Strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.*

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal untuk implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. ***Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan pendidikan.***

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; dan

5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan wajib bidang pendidikan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang pendidikan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

Bab V memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan pendidikan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII Penutup

Bab VII berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.

GAMBARAN PELAYANAN

BAB. II

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan asas otonomi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah:

Dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016.

KELOMPOK SEKRETARIAT

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan.

Fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, *penyiapan bahan*

- rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;*
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan.

KELOMPOK BIDANG

1) **Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, melaksanakan tugas dan fungsi:**

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- f. pelaksanaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
 - h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.;
- 2) Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas dan fungsi :

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan.

3) Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, tugas dan fungsi :

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.
- 4) Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas dan fungsi;

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;

- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus; dan
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

KELOMPOK SUB BAGIAN

Kelompok Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, melaksanakan tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
 - c) Menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
 - d) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - e) Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
 - f) Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
 - g) Menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
 - h) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagian atasan;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- 2) Subbagian Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
 - d) Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
 - e) Melakukan pembinaan bendaharawan;
 - f) Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
 - g) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
 - h) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;

- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang melaksanakan tugas:
 - a) Melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - b) Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas Pendidikan;
 - c) Mengelola organisasi dan tatalaksana;
 - d) Melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - e) Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

KELOMPOK SEKSI

- 1) Kelompok Bidang Pembinaan SMA, terdiri atas:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan

- (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas.
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA, melaksanakan tugas :
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian , penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
 - (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas.
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA, melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
 - (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas; dan
 - (4) pelaporan bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas.
- 2) Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
 - a) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
 - (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local dan kriteria penilaian sekolah menengah kejuruan;
 - (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;

- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan; dan
 - (5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan.
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK, melaksanakan tugas:
- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah kejuruan;
 - (3) penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri;
 - (4) penyiapan pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
 - (5) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
 - (6) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah kejuruan; dan
 - (7) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan.
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
 - (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan.
- 3) Kelomok Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas:
- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Khusus, melaksanakan tugas:
- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;

- (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan khusus;
 - (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus; dan
 - (5) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan khusus.
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana khusus, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
 - (3) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus; dan
 - (5) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus.
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter khusus, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
 - (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pendidikan khusus; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pendidikan khusus.
- 4) Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus, melaksanakan tugas:

- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - (2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus; dan
 - (5) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus.
- b) Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - (2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - (4) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
 - (6) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan.
- 5) KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL TERTENTU, dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) KELOMPOH UPT DINAS
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi dan

Informasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Unit Pelaksana Teknis, Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pengkajian, mengembangkan, melaksanakan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- b. persiapan dan pelaksanaan program teknologi komunikasi pendidikan;
- c. pengembangan dan penyebarluasan sistem model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi;
- d. pengembangan dan pengaturan standarisasi pendidikan jarak jauh;
- e. pembinaan dan penelitian pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- f. pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tagga dan perlengkapan; dan
- h. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kegiatan dan tata kerja serta mengembangkan Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

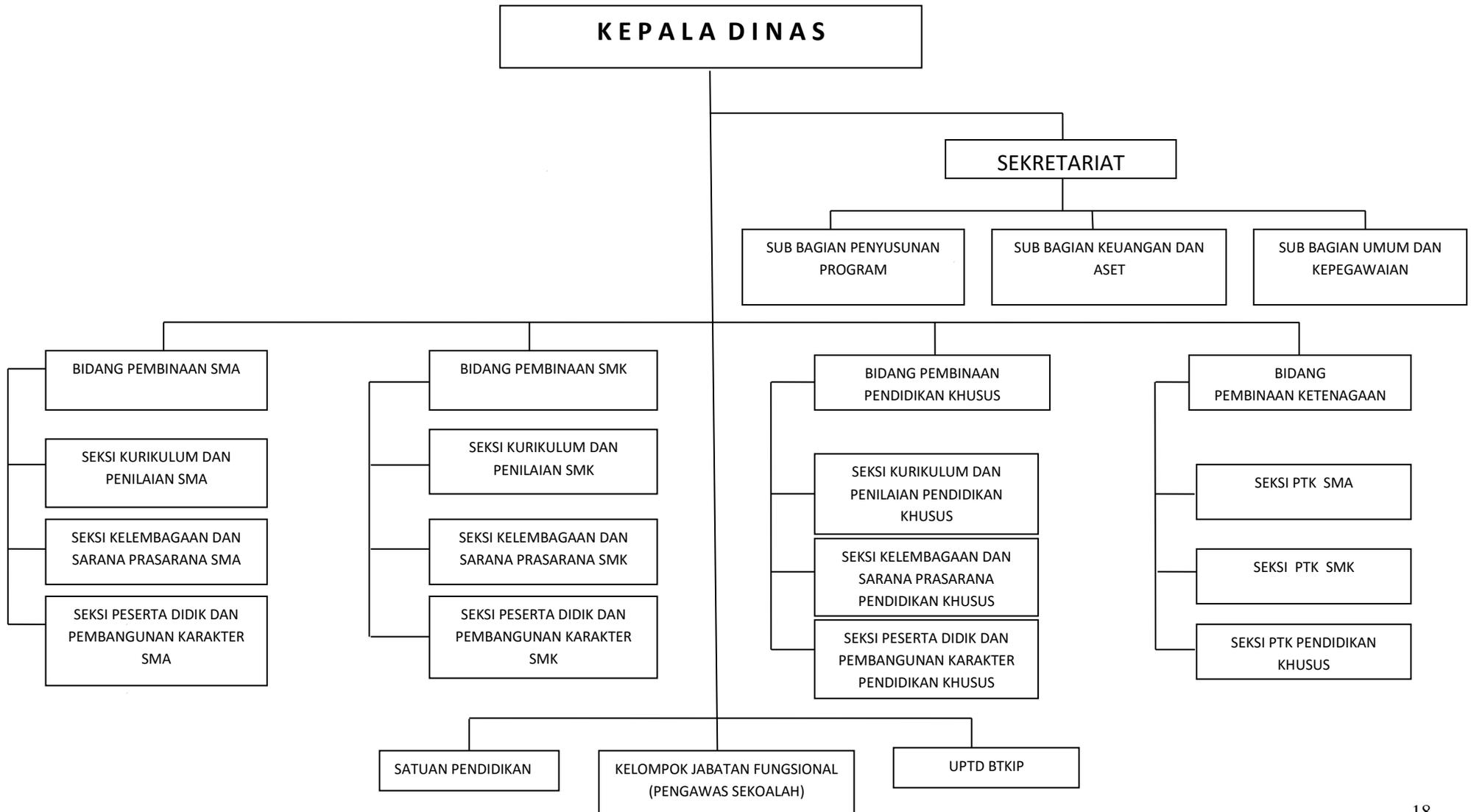
1. perumusan dan pengoordinasian rencana program kerja Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
2. persiapan dan pelaksanaan program teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
3. pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;

4. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dan program pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan; dan
5. penyusunan laporan kegiatan balai sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Teknologi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran;
- c. Seksi Teknologi Informasi Pendidikan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

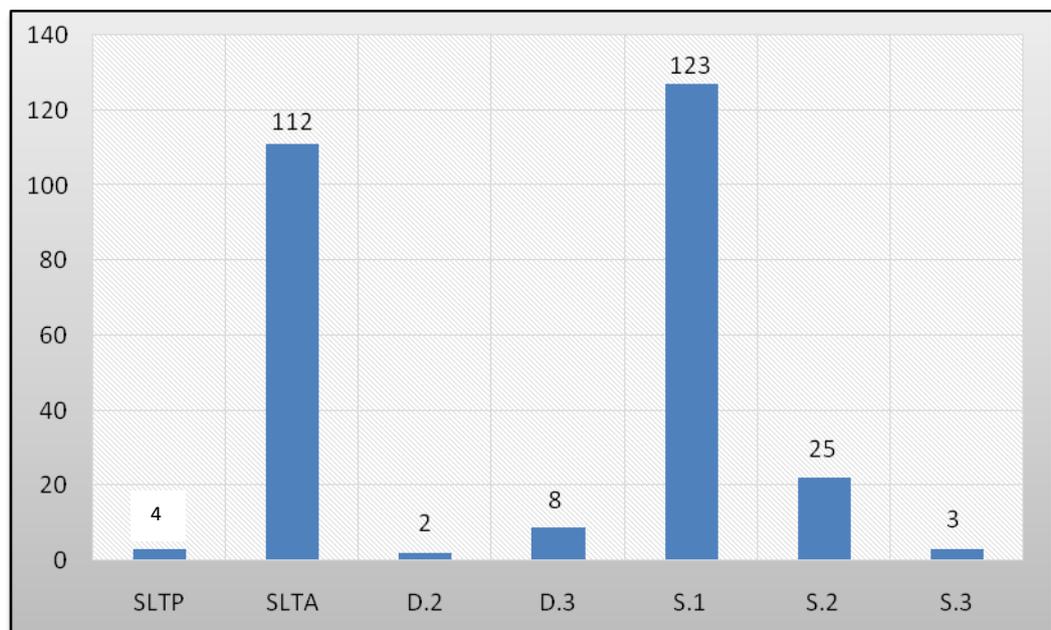


2.2.Sumber Daya SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana data yang ada berjumlah 277 pegawai negeri yang terdiri dari 147 pegawai laki-laki dan 130 pegawai perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2.2
Banyaknya Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah



Ketenagaan Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Pendidikan Tahun 2015(orang)

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 277 orang. Berikut ini tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2015.

Tabel 2.1

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2015

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan I A	-
	Golongan I B	-
	Golongan I D	3 Orang
2	Golongan II A	7 Orang
	Golongan II B	18 Orang
	Golongan II C	5 Orang
	Golongan II D	7 Orang
3	Golongan III A	23 Orang
	Golongan III B	104 Orang
	Golongan III C	14 Orang
	Golongan III D	44 Orang
4	Golongan IV A	42 Orang
	Golongan IV B	7 Orang
	Golongan IV C	1 Orang
	Golongan IV D	1 Orang
JUMLAH		277 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Prov. Kalteng.

Bermodalkan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personil memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.2

Komposisi Data Pegawai Tiap Bidang/UPTD Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015

No.	Bidang/UPT/Fungsional	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3
1.	Sekretariat	-	3	26	1	1	25	5	0
2.	Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan	-	0	13	0	1	10	2	2
3.	Bidang Pendidikan Dasar	-	0	17	0	2	18	3	0
4.	Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa	-	1	18	0	1	19	2	0
5.	Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	-	0	17	0	1	13	6	0
No.	Jabatan Fungsional	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3
1.	Kelompok Pengawas	-	-	-	-	-	5	2	1
No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3
1.	Balai Pelatihan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal	-	-	10	1	1	25	3	0
2.	Balai Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan	-	-	11	0	1	8	2	0
	JUMLAH	-	4	112	2	8	123	25	3

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	116	Unit
2	Monitor	8	Unit
3	Printer	60	Unit
4	Notebook / Laptop	15	Unit
6	LCD Proyektor	15	Unit
7	Mesin Tulis / Mesin Ketik	4	Unit
8	AC Sentral	80	Unit
9	AC Split	38	Unit
10	Televisi	62	Unit
11	Sound System	1	Unit
12	Filling Cabinet	54	Unit
13	Kendaraan Roda 4	14	Unit
17	Kendaraan Roda 2	10	Unit
18	Ruang Sidang/Rapat (daya tampung)		
	- Lantai I	500	Orang
	- Lantai II	50	Orang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun anggaran 2015, yaitu:

Tabel 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Belanja Langsung (BL)
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	2011	203.427.400.000	0,00	192.001.641.777	94,38
2	2012	169.430.035.696	(16,71)	156.062.468.170	92,11
3	2013	184.738.214.592	9,04	166.840.924.731	90,31
4	2014	181.035.353.373	(2,00)	161.698.929.300	89,32
5	2015	142.796.000.000	(21,12)	107.775.756.000	75,48

Sumber : Sub.Bagian Program Disdik Prov. Kalteng

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2011 hingga tahun anggaran 2015, menunjukkan angka yang pluktuatif, pada tahun anggaran 2012 terjadi penurunan sebesar Rp. 33.997.364.804; atau 16,71%, pada tahun anggaran 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp. 15.308.179.396; atau 9,04%, kemudian pada tahun anggaran 2014 terjadi penurunan kembali sebesar Rp. 3.702.861.219; atau 2,00%, dan pada tahun anggaran 2015 terjadi penurunan sebesar Rp. 38.239.353.373; atau 21,12%, sedangkan untuk realisasi pada akhir tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di atas. Tetapi pagu anggaran untuk fungsi pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai 20% sebagai mana yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tentang anggaran fungsi pendidikan yang minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi APBN Dekonsentrasi
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	2011	150.441.477.000	0	150.441.477.000	100
2	2012	113.001.758.000	(23,63)	104.762.001.824	92,71
3	2013	12.819.563.000	(88,66)	12.429.933.392	96,96
4	2014	40.354.606.000	214,79	39.728.619.829	98,45
5	2015	24.590.255.000	(39,06)	23.191.584.970	94,31

Pagu anggaran dan realisasi APBN(Dekonsentrasi) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2011 hingga tahun anggaran 2015, menunjukkan angka yang pluktuatif, pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 150.441.477.000; dengan realisasi sebesar Rp. 150.441.477.000; (100%), pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 113.001.758.000; dengan realisasi sebesar Rp. 104.762.001.824;(72,71%), pada tahun 2013 pagu sebesar Rp. 12.819.563.000; dengan realisasi sebesar Rp. 12.429.933.392 (96,96%), dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 40.354.606.000; dengan realisasi sebesar Rp. 39.728.619.829 (98,45%), dan padatahun 2015 pagu sebesar Rp. 24.590.255.000 dengan realisasi sebesar Rp. 23.191/584.970; (94,31%), secara khusus untuk besaran pagu anggaran dana Dekonsentrasi tergantung pada program pusat yang di Dekonkan ke Provinsi, sedangkan kegiatan lainnya dikelola oleh pusat seperti halnya melalui dana DAK yang langsung ke Kabupaten/Kota atau langsung ke sekolah yang bersangkutan.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Target PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	2012	20.000.000	0%	20.000.000	100 %
2	2012	25.000.000	25,00%	25.000.000	100 %
3	2013	28.750.000	15,00%	28.800.000	100,17%
4	2014	33.061.500	15,00%	25.750.000	77,88%
5	2015	38.500.000	16,45%	41.500.000	108%

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah. Penerimaan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun terakhir terjadipeningkatan, artinya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat memaksimalkan kemampuannya, walaupun Penerimaan Asli Daerah (PAD) hanya dari kontribusi barang/fasilitas milik daerah. PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2012, 2013, 2014, realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selalu mampu mencapai target, namun pada tahun 2015 tidak mampu mencapai target karena fasilitas daerah pada BP2PNFI pada tahun 2015 direhabilitasi, realisasi tersebut seperti terlihat pada tabel 2.6 diatas.

2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan

pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertekad mewujudkan insan Kalimantan Tengah yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

1. Aspek Pelayanan Umum

1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jenis pelayanan PAUD meliputi : (1) Taman Penitipan Anak (TPA) dengan sasaran anak usia 0-2 tahun, (2) Kelompok Bermain (KB) dengan sasaran anak usia 3-4 tahun, dan (3) Taman Kanak-Kanak/Raudlotul Athfal (TK/TKLB/RA) dengan sasaran anak yang berusia 5-6 tahun.

a. Perkembangan TK/TKLB/RA

Sejalan dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya peran serta masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan pendidikan anak usia dini, khususnya TK/RA mengalami peningkatan cukup signifikan mulai tahun 2011-2015 dengan data sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Data Perkembangan TK/TKLB/RA di Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

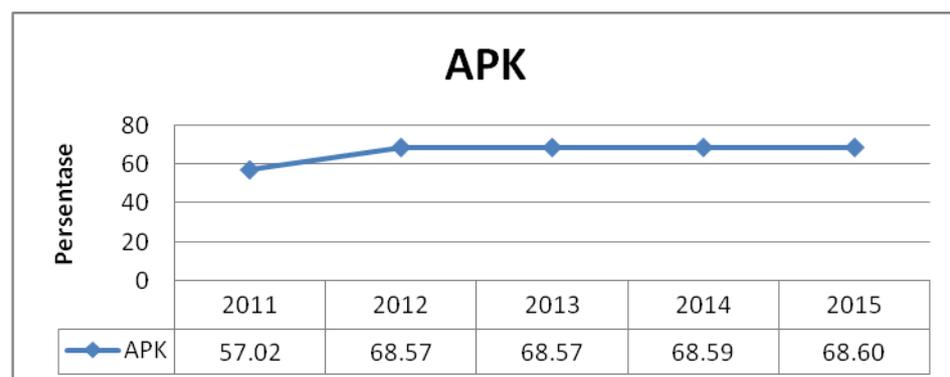
No	Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sekolah	1.128	1.276	1.287	1.287	1.681
2.	Ruang Kelas	4.472	4.538	4.817	5.043	5.787
3.	Siswa	26.741	28.009	31.408	34.546	38.556
4.	Guru	5.046	5.521	5.520	5.669	6.021

Sumber Data : Bidang PNFI

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2011-2015 juga mengalami peningkatan dari 57,02% pada tahun 2011 menjadi 68,86% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya meningkat. Apabila dibandingkan dengan target capaian nasional sudah diatas target nasional, sebagaimana pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar .2.2
Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

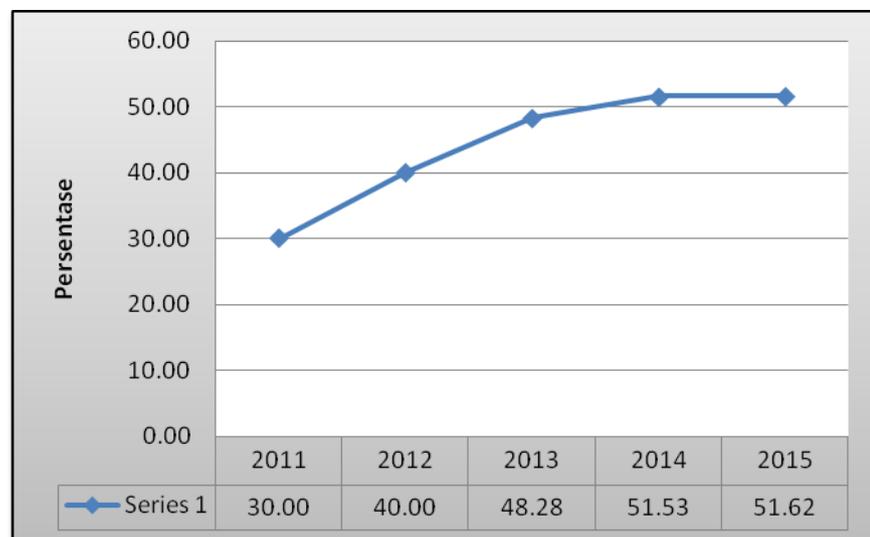


c. **Kualifikasi Pendidik PAUD**

Kualifikasi pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 persentase pendidik TK/TKLB/RA yang memiliki kualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada Gambar 2.3

Gambar.2.3

Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



1.2. Pendidikan Dasar (DIKDAS)

Jenjang Pendidikan dasar (DIKDAS) merupakan program prioritas dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran Dikdas adalah anak usia 7-12 tahun untuk jenjang SD/SDLB/MI dan anak usia 13-15 tahun untuk jejang SMP/SMPLB/MTs.

1.2.1. Perkembangan Pendidikan Dasar (SD)Sejalan dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya peran serta masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan pendidikan Dasar, khususnya SD/SDLB/MI mengalami

peningkatan cukup signifikan mulai tahun 2011-2015 dengan data sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Data Perkembangan SD/SDLB/MI di Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

No	Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sekolah	2.718	2.850	2.854	2.854	2.854
2.	Ruang Kelas	16.308	17.100	17.124	17.124	17.124
3.	Siswa	317.520	334.599	336.465	358.578	358.578
4.	Guru	28.562	29.530	29.493	28.612	28.612

Sumber Data : Profil Pendidikan dan Bidang Dikdas

1.2.2. Perkembangan Pendidikan Dasar (SMP) Sejalan dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya peran serta masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan pendidikan Dasar, khususnya SMP/SMPLB/MTs mengalami peningkatan cukup signifikan mulai tahun 2011-2015 dengan data sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Data Perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

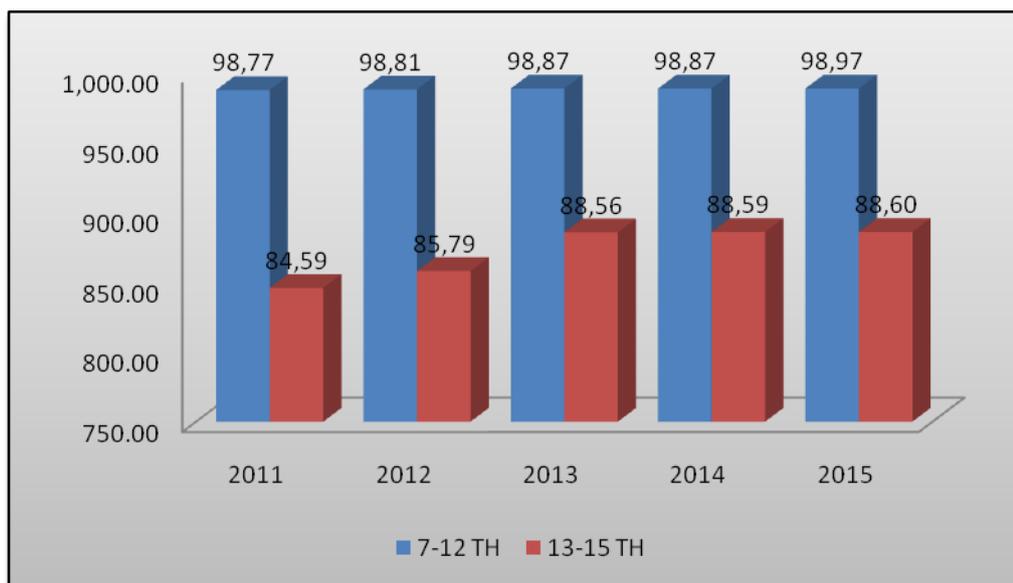
No	Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sekolah	780	817	835	845	845
2.	Ruang Kelas	6.828	7.148	7.306	7.394	7.394
3.	Siswa	103.547	114.332	115.804	139.553	139.556
4.	Guru	9.219	9.363	9.668	9.660	9.660

Sumber Data : Profil Pendidikan dan Bidang Dikdas

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur pendidikan dasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2011 sebesar 98,77, dari 1.000 penduduk usia sekolah, meningkat menjadi 98,97 % pada tahun 2015. APS penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan dari 84,59% pada tahun 2011, menjadi 88,60% pada tahun 2015 hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar.2.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Dikdas
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



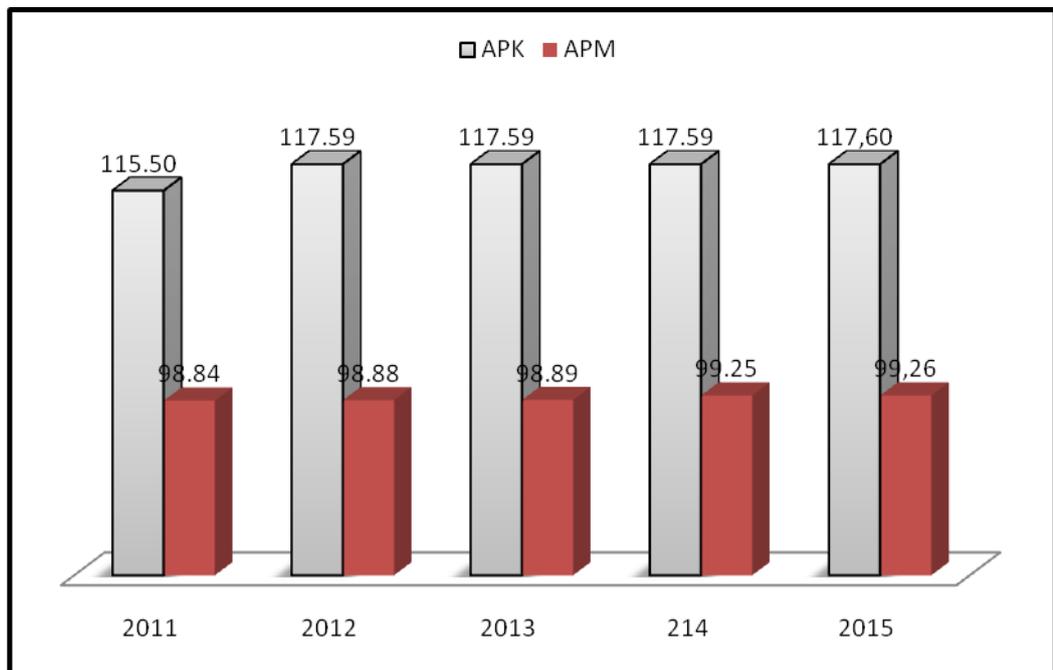
Dari 1.000 penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar

b. Perkembangan APK/APM Jenjang Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs

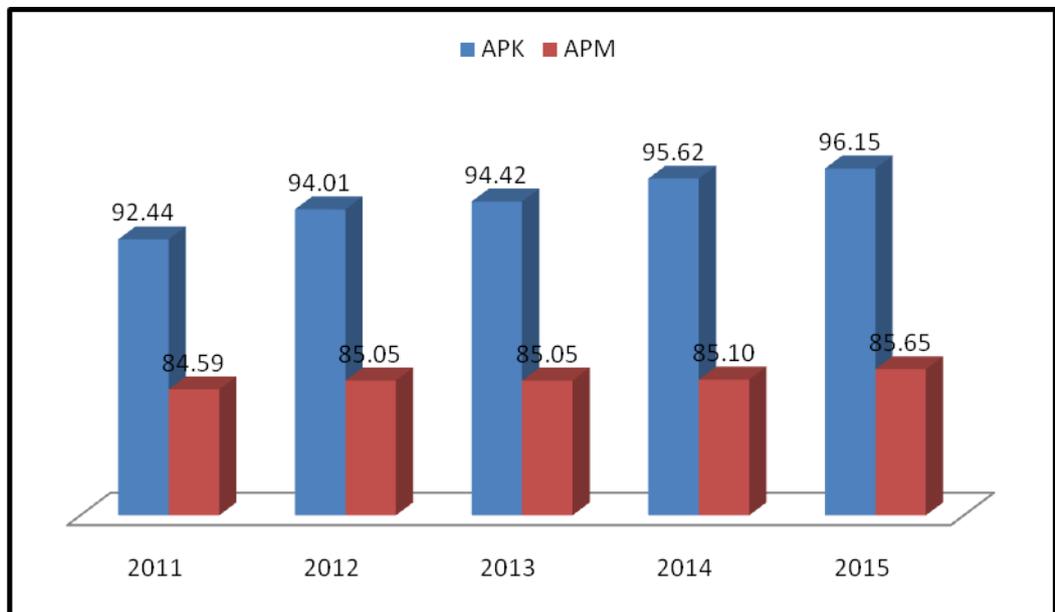
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Muruni (APM) Dikdas di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 APK SD/MI sebesar 115,50%, menjadi 117,60% pada tahun 2015. Demikian juga

APM jenjang SD/MI pada tahun 2011 sebesar 98,84% menjadi 99,25% pada tahun 2015. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2011 APK SMP/MTs sebesar 92,44%, menjadi 95,62% pada tahun 2015, dan untuk APM SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 84,59% meningkat menjadi 85,10 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dan di atas target nasional, untuk APK/APM SD/MI dapat dilihat pada Gambar 2.5. dan APK/APM SMP/MTs dapat dilihat pada Gambar.2.6

Gambar 2.5
Perkembangan APK dan APMSD/MI
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



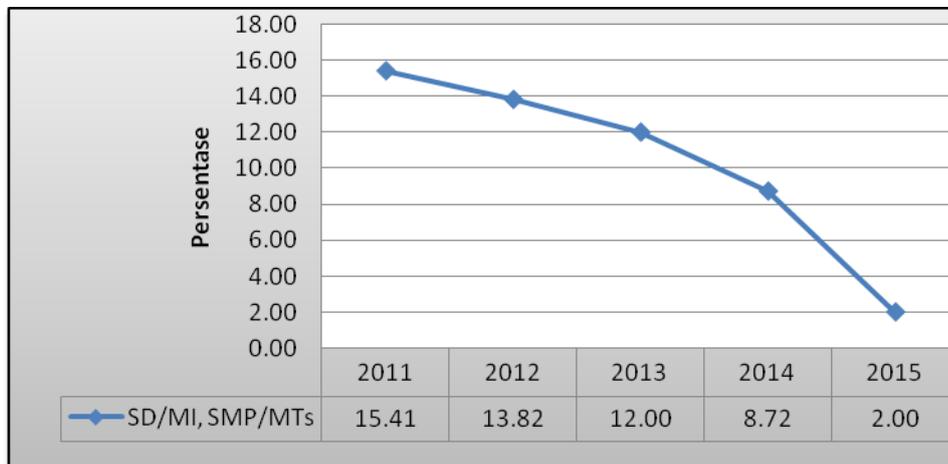
Gambar .2.6
Perkembangan APK dan APMSMP/MTs
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



c. Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar 15,41% menjadi 8,72% pada tahun 2015. Walaupun ada penurunan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun 2011-2015 namun terus diperjuangkan agar angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar ini sekecil mungkin, dan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7

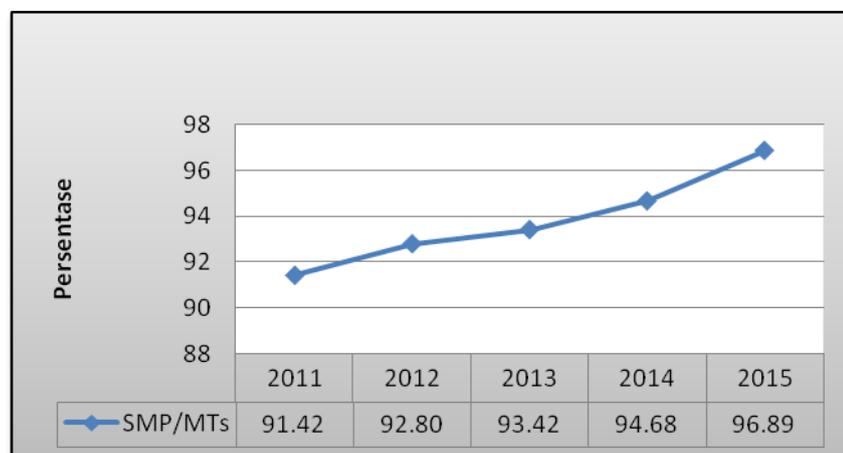
Gambar. 2.7
Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
SD/MI dan SMP/MTs
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



d. Angka Melanjutkan SMP/MTs

Persentase siswa lulus SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK sederajat dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 91,42% meningkat menjadi 94,64% pada tahun 2015, selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar. 2.8
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Sederajat
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



2.1. Pendidikan Menengah (DIKMEN)

Jenjang Pendidikan menengah (DIKMEN) merupakan jenjang strategis dalam mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau terjun ke dunia usaha/dunia kerja (DU/DI). Sasaran dikmen adalah anak usia 16-18 tahun untuk jenjang SMA, SMALB, SMK, dan MA.

Tabel 2.10

**Data Perkembangan SMA/SMALB/MA/SMK di Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015**

No	Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sekolah	354	355	361	361	360
2.	Ruang Kelas	2.228	2.187	2.345	2.692	2.899
3.	Siswa	65.555	66,426	70.333	75.472	78.833
4.	Guru	6.273	6.710	6.719	6.958	7.052

Sumber Data : Bidang Dikmen

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikmen

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikmen di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan dari 65,09% pada tahun 2011, menjadi 83,07% pada tahun 2015, walaupun mengalami peningkatan capaian tersebut termasuk kategori rendah disebabkan antara lain masih tingginya biaya pendidikan, keberadaan sekolah secara geografis jauh dari pemukiman dan kurangnya sarana dan prasarana atau jumlah sekolah. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar. 2.10

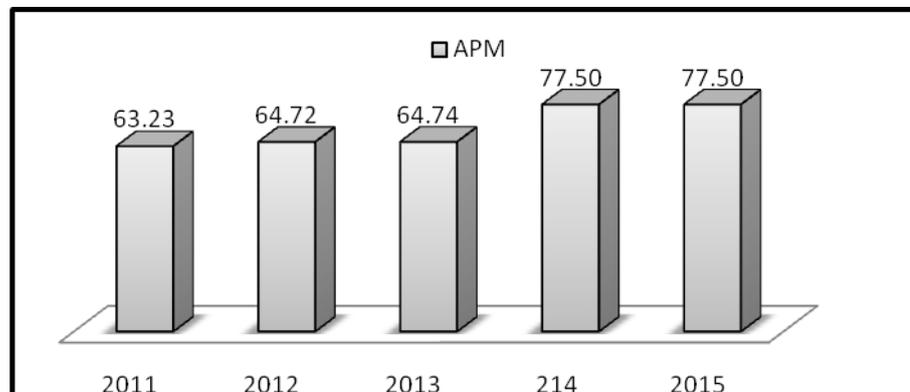
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Dikmen
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015**



b. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Dikmen

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 63,25% meningkat menjadi 77,50%, pada tahun 2015. Walaupun mengalami peningkatan namun masih harus ditingkatkan, dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar .2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015



Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD diukur melalui capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2015 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.11
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011-2015
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program dan Indikator	Targrt RPJMD 2011- 2015	Realisasi Capaian Indikator RPJMD				
			2011	2012	2013	2014	2015
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	62,50	57,02	68,57	68,57	68,59	68,60
2	Kuaifikasi Pendidikan PAUD	56,16	30,00	40,00	48,28	51,53
II	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun						
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	98,97	98,77	98,81	98,87	98,87	98,97
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/PendudukUsia Sekolah 7-12 Th	91,55	89,55	90,07	90,55	91,09	91,09
3	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	1:24	1:17	1:25	1:25	1:25	1:25
4	Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	98,45	45,65	55,95	65,79	75,16
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A	99,04	98,84	98,88	98,89	99,25	99,25
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Paket A	119,50	115,50	117,59	117,59	117,59	117,60
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	95,00	84,59	85,79	88,56	88,59	88,59
8	Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk	42,68	45,18	69,63	67,18	67,35

	Usia Sekolah SMP/MTs						
9	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	1:20	1:17	1:22	1:22	1:22	...
10	Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4	98,45	59,16	68,80	79,53	82,15	...
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B	98,02	92,44	94,01	94,42	95,62	...
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	84,76	84,59	85,05	85,05	85,10	...
III	Program Pendidikan Menengah						...
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	67,24	63,20	64,30	65,25	66,24	...
2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 16-18 Tahun	24,00	25,00	24,74	24,50	24,25	...
3	Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK	1:20	1:17	1:20	1:20	1:20	...
4	Persentase guru SMA/SMALB/MA/SMK berkualifikasi S1/D4	98,00	74,58	80,14	85,46	92,53	...
5	Persentase guru SMA/SMALB/SMK melaksanakan e-learning	20	8	12	14	16	...
6	Persentase Angka Partisipasi Kasar PLB setara SDLB	72,83	66,83	69,15	69,15	70,03	...
7	Persentase Angka Partisipasi Kasar PLB setara SMPLB	62,74	61,34	61,59	61,59	62,59	...
8	Persentase Angka	61,83	55,89	57,14	58,23	59,43	...

	Partisipasi Kasar PLB setara SMALB						
IV	Program Pendidikan Non Formal						...
1	Persentase Angka Melek Huruf	98,80	98,84	99,18	99,40	99,56	...

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus untuk Pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pengelolaan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus, sedangkan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Pendidikan Dasar SD/SMP merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Karena Undang Undang 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan pembagian kewenangan tersebut maka untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar SD/SMP dalam Rancangan Progran Tahun 2016-2021 ditiadakan, namun mengingat Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang berada di Provinsi maka wajib untuk mengendalikan semua jenjang pendidikan dari Pendidikan Anak usia Dini sampai dengan Pendidikan Menengah, maka oleh karena itu target capaian kinerja untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar SD/SMP dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Target Capaian Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dan Pendidikan Dasar SD/SMP 2016-2021
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program dan Indikator	Kondisi Tahun 2015	Target Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	62,50	67,02	68,57	68,57	68,59	68,60	
II	Pendidikan Dasar(SD)							
1	Persentase Guru	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00

	Profesional di SD minimal 80%							
2	Angka Partisipasi Murni SD	95,60	95,60	95,90	96,20	96,50	96,80	97,10
3	Angka Partisipasi Kasar SD dan Paket A	113,65	114,74	115,26	115,76	116,26	116,76	117,27
4	Persentase SD berakreditasi minimal B	34,30	34,34	50,00	60,00	75,00	76,00	77,00
5	Angka Putus Sekolah SD	1,50	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75
III	Pendidikan Menengah Pertama (SMP)							
1	Persentase Guru SMP Profesional minimal 95%	93,50	93,71	93,76	93,86	94,06	94,36	95,00
2	Angka Partisipasi Kasar SMP dan Paket B	90,85	95,94	96,44	96,49	96,54	96,59	96,64
7	Angka Partisipasi Murni SMP	85,54	85,70	85,73	85,76	85,79	85,82	85,85
8	Persentase SMP berakreditasi B	43,30	43,30	50,00	60,00	65,00	75,00	77,00
9	Angka Putus Sekolah SMP	1,53	1,10	1,08	1,03	1,01	0,95	0,90

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pengembangan serta pembinaan bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun kedepan adalah:

1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pelayanan pada publik;
- b. Sinergitas tanggung jawab dengan masyarakat;
- c. Kompetensi lulusan;
- d. Kondisi Geografis;
- e. Ledakan penduduk akibat industri dan perkebunan;
- f. Persaingan global.

2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah;
- b. Masyarakat Orang Tua dan Dunia Usaha/Industri;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Penduduk usia sekolah;
- e. Kemajuan Teknologi Komunikasi;

3. Kekuatan

- a. Sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang Tupoksi Disdik;
- b. Ketersediaan sumber dana pembangunan pendidikan dari APBD dan APBN;
- c. Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pembangunan bidang pendidikan;
- d. Sistem Informasi Manajemen;
- e. Hasil pembangunan bidang pendidikan.

4. Kelemahan

- a. Optimalisasi SDM dan Tupoksi SKPD;
- b. Ketepatan dan kesesuaian perencanaan dan penganggaran;
- c. Ketepatan dan kesesuaian jabatan;
- d. Keterlaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah;

- e. Fasilitas Sistem Informasi Manajemen di daerah;
- f. Akurasi dan kebermaknaan sarana dan prasarana;

Kondisi yang diharapkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan kualitas dan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja guna peningkatan mutu dan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur secara optimal;
3. Mengoptimalkan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal;
4. Optimalisasi sistem informasi manajemen dalam mendukung pembangunan pendidikan;
5. Mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan.

a. Target Pendapatan

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 2.13. berikut ini.

Tabel 2.13
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 dan 2015

No	Jenis Pendapatan	Target (ribuan Rp)			Realisasi (ribuan Rp)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	28.750	33.062	38.500	28.800	25.750	41.500
2.	Penerimaan lain – lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah		28.750	33.062		28.800	25.750	41.500

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran sebesar Rp.166.117.221.926,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji PNSD) sebesar Rp. 23.321.221.926 ; dan Belanja Langsung (LS) sebesar Rp.

142.796.000.000; namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 22.044.186.326; atau sebesar 94,56%, untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan untuk Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 107.775.756.000; atau sebesar 75,48% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 36.297.279.600,- atau sebesar 21,85%.

Tabel 2.14
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja APBD Tahun 2015

Kelompok Belanja	Anggaran 2014	Realisasi		SILPA	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	23.321.221.926	22.044.186.326	94,56	1.277.035.600	5,48
Belanja Langsung	142.796.000.000	107.775.756.000	75,48	35.020.244.000	24,52
Jumlah Belanja	166.117.221.926	129.819.942.326	78,15	36.297.279.600	21,85

Dilihat dari tabel 2.10, mengenai realisasi pelaksanaan anggaran belanja APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 atau SILPA dari jumlah belanja tahun 2015 sebesar Rp. 36.297.279.600; atau (21,85%).

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB. III

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya **Visi** dan **Misi** Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan untuk selama lima tahun ke depan (2016-2021).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, relevansi, keterjangkauan, kualitas, dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, pendidikan dapat dilihat melalui indikator antara lain APM SD/MI baru mencapai 99,25% dan APM SMP/MTs mencapai 85,10% Tahun 2014, yang masih perlu didorong untuk mencapai sebesar target 100% padatahun 2015. Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK baru mencapai 83,07%, dan APM SMA/MA/SMK mencapai 77,50%.

Untuk itu pembangunan pendidikan dihadapkan pada permasalahan untuk meningkatkan APK SMA/MA/SMK dan Rata-rata lama sekolah, hal ini berkaitan dengan angka pendidikan yang ditamatkan sehingga saat ini untuk tenaga kerja didominasi oleh pekerja yang tamat SD dan SMP, dan juga masih belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagai alternatif pendidikan formal yang merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya. Untuk periode tahun 2016-2021 yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pendidikan Menengah yaitu SMA/SMK dan Paket C, dan Pendidikan Luar Biasa (SLB), sedangkan Kabupaten/Kota adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Informal, serta Pendidikan Dasar (SD/SMP) sedangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tasnawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) pengelolaanya merupakan kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabel 3.1

CAPAIAN APK DAN APM DIKDAS DAN DIKMEN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	CAPAIAN APK				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/Paket A	115,50	117,59	117,59	117,59	117,60
2	SMP/MTs/Paket B	92,44	94,01	94,42	95,62	96,15
3	SMA/MA/SMK/Paket C	65,09	65,42	68,09	83,07	83,15
NO	JENJANG PENDIDIKAN	CAPAIAN APM				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26
2	SMP/MTs	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
3	SMA/MA/SMK	63,23	64,72	64,74	77,50	77,50

Terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan ini maka untuk periode yang akan datang yaitu Tahun 2016-2021 untuk target kinerja dalam hal pencapaian APK/APM untuk Pendidikan Dasar nantinya akan mengalami perubahan dalam hal ini penurunan tingkat capaian kinerja maupun target kinerja, dari periode Renstra tahun 2010-2015 karena yang dihitung pada Renstra 2016-2021 hanyalah untuk SD/Paket A, SMP/Paket B begitu juga untuk jenjang Pendidikan Menengah adalah SMA/SMK/Paket C dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Adapun kontribusi MI untuk tingkat capaian APK/APM untuk jenjang Pendidikan Dasar (SD) pada tahun 2015 mencapai di atas 12%, untuk APK/APM jenjang SMP kontribusi dari MTs di atas 12%, dan untuk jenjang pendidikan menengah SMA/SMK kontribusi dari MA mencapai sebesar di atas 11%.

Bila dilihat dari aspek kualitas terlihat masih rendahnya kualitas siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan. Sementara Nilai Ujian Akhir Sekolah Dasar masih belum optimal yaitu masih rata-rata dikisaran angka 6,00 sampai dengan 6,79 dan kedepan diharapkan 7,00 keatas untuk SD, sedangkan untuk SMP/MTs dikisaran 6,00, kedepan diharapkan 7,00 keatas, dan untuk SMA/MA dikisaran 5,00 dan SMK dikisaran 5,00 kedepan diharapkan 6,50 ke atas.

Terkait pendidik dan tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kualitas tenaga pendidik antara lain karena masih banyak tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4, dalam hal ini dapat dilihat bahwa tenaga pendidik SD/SDLB yang berkualifikasi akademik S1/D4 baru mencapai 75,16%, SMP/SMPLB mencapai 82,15%, dan SMA/SMK/SLB tenaga pendidik sebanyak 4.830 orang, sedangkan yang belum berkualifikasi S1/D4 atau yang masih berkualifikasi D3 kebawah sebanyak 364 orang dengan demikian masih terdapat 7,54% guru SMA/SMK/SLB yang belum berkualifikasi S1/D4 sedangkan yang berkualifikasi S1/D4 sebanyak 4.466 orang atau 92,46%, sebagai mana peraturan yang mewajibkan bahwa kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB minimal S1/D4, dan juga tingkat kompetensi tenaga pendidik sangat perlu ditingkatkan. Selain kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, juga masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti Perpustakaan, Laboratorium, dan lainnya kesemuanya ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Permasalahan inilah yang perlu mendapat

perhatian bersama oleh semua pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan, dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas) antara lain :

- a. Belum terpenuhinya Standar Sarana dan Parasarana Pendidikan Dasar;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- c. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
- d. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan dasar;

2. Kurangnya keterjangkauan, relevansi, kualitas Pendidikan Menengah (Dikmen) yang disebabkan oleh :

- a. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah;
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Menengah;
- c. Kurangnya Tenaga Pendidik SMK untuk Mata Pelajaran Produktif;
- d. Belum optimalnya link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri untuk Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
- f. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan menengah;
- g. Belum seluruhnya satuan pendidikan menengah menerapkan Manajemen Mutu;

3. Kurangnya ketersediaan, kualitas Pendidikan Khusus antara lain disebabkan oleh :

- a. Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana Pendidikan Khusus;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- c. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan Pendidikan Khusus.
- d. Kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan ketunaan.

4. Kurangnya kualitas dan relevansi pendidik dan tenaga kependidikan yang disebabkan oleh :

- a. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Sebagian tenaga pendidik belum memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4;
- c. Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik;
- d. Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
- f. Penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang.

5. Kurangnya kepastian dan kualitas layanan pendidikan, yang disebabkan oleh :

- a. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur;

6. Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter yang disebabkan oleh :

- a. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemanfaatan nilai-nilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- b. Belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- c. Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti.

7. Kurangnya layanan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, antara lain disebabkan :

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur;
- c. Kurangnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 30 Tahun 2016, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah “ **KALTENG MAJU, MANDIRI, & ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH**” (**BERMARTABAT, RELIGIUS, ELOK, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS**)”

Untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan 8 (delapan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, adapun misi yang berhubungan dengan pendidikan adalah Misi ke 6 (enam) yaitu :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Percepatan Pembangunan Inprastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi;
- 6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;**
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian **Misi ke 6 (enam)** yaitu :

“ Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata ”

Adapun Misi yang berhubungan dengan Pendidikan dengan Tujuan **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan,** dengan Indikator Sasaran : ***Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf.***

3.3. Telaahan Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019

1. Visi

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan dilandasi Semangat Gotong Royong”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut :

- 3.3.1.1. Terbentuknya **insan mandiri** mencerminkan kemampuan untuk mewujudkan pendidikan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan

- mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta memiliki karakter yang inovatif, profesional dan relevan dengan kebutuhan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- 3.3.1.2. Terbentuknya **insan berkepribadian** mencerminkan mental yang kuat secara moral, menguasai Iptek, tabah, handal, serta sikap tanpa menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan;
- 3.3.1.3. Terbentuknya **kualitas pendidikan karakter** untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui : a) penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam mata pelajaran; b) pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberikan porsi yang proporsional mata pelajaran budipekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan c) peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai *rolemodel* dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik;
- 3.3.1.4. Terbentuknya **budaya sekolah yang kondusif** bagi penciptaan ekosistem/lingkungan belajar yang baik bagi siswa melalui : a) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; b) pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna;
- 3.3.1.5. Terpenuhinya **ketersediaan guru dan tenaga pendidikan** serta sarana dan prasarana yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada seluruh ekosistem satuan pendidikan;
- 3.3.1.6. Terjaminya **kepastian seluruh warga negara Indonesia memperoleh pendidikan bermutu** dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, bahasa, ekonomi, geografi, dan jender.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai :

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik serta terbentuknya sumber daya kebudayaan yang profesional;
3. Terbentuknya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun bukan benda (*intangible*) serta meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Dilandasi dengan gotong royong dapat dimaknai sebagai :

Kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia khususnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila yaitu sila ke-3 "Persatuan Indonesia". Gotong royong merupakan paham dinamis. Oleh karena itu untuk membangun peradaban sebuah bangsa harus dilakukan dengan membangun budi pekerti serta membangkitkan semangat kebersamaan.

Gotong royong merupakan suatu kepribadian yang tangguh dan semangat untuk memajukan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan secara bersama oleh semua komponen bangsa dengan melibatkan pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat, melalui penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu akses dan relevansi serta pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, dalam rangka membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Salah satu ukuran terwujudnya gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan/sekolah (kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan); pemerintah dan pemerintah daerah; serta lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Selain itu juga adanya kemudahan bagi masyarakat/pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan untuk mendapat pelayanan yang mudah, murah dan bermutu. Indikator ukuran lainnya adalah adanya partisipasi aktif/aksi kolektif masyarakat dalam bergotong royong dan kegiatan bakti sosial serta jejaring sosial untuk melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan **Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan**
2. Mewujudkan **Peningkatan Mutu dan Akses yang Merata**
3. Mewujudkan **Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa**
4. Mewujudkan **Efektivitas Birokrasi serta Perbaikan Tata Kelola** dan Pelibatan Publik.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015-2019 berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan kebudayaan adapun **Tujuan Strategis** sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.

4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
5. Peningkatan Mutu Pembeajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
6. Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan
8. Peningkatan Mutu dan Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan serta Peran Bahasa Indonesia di Kawasan Asean
9. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akunabel dengan Melibatkan Publik.

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dirumuskan menurut jenjang pendidikan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD
2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini
3. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-12) tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A
4. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (13-15) tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B
5. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SNP
6. Meningkatnya siswa usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)
7. Menurunnya siswa putus sekolah tingkat SMA/SMK
8. Menurunnya penduduk nirakarsa usia 15-59 tahun yang buta aksara
9. Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi
10. Masyarakat yang belum lulus pendidikan dasar dan menengah semakin meningkat jumlahnya dalam memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah
11. Meningkatnya mutu lulusan pendidikan masyarakat
12. Meningkatnya mutu layanan Satuan Pendidikan Masyarakat termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan, PKBM, dan Satuan PNF sejenis lainnya.
13. Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
14. Meningkatnya mutu lulusan pendidikan menengah

15. Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah
16. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar
17. Meningkatnya mutu layanan pendidikan menengah
18. Meningkatnya penerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK

Peran serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada kewenangan baik kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, secara khusus partisipasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan :

1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan Anak Usia Dini
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar
3. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Menengah
4. Meningkatkan layanan dan kualitas Pendidikan Khusus
5. Meningkatkan ketersediaan dan layanan Pendidikan Non Formal
6. Meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan
7. Meningkatkan kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter

3.4. Telaahan RTRWP dan Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis, letak Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara **0° 45** Litang Utara **3°30** Lintang Selatan dan **111°** Bujur Timur, terletak di antara 3 (tiga) Provinsi tetangga yaitu di sebelah Utara dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di sebelah Timur dengan sebagian Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564 Km², dengan adanya pemekaran dan pembentukan 8 (delapan) kabupaten baru yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Tengah berkembang menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota.

Untuk pendidikan dalam hal pembangunan gedung sekolah Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justru melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penataan Lingkungan

Sekolah, Pembangunan Akses Sekolah selalu memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tidak memanfaatkan ruang hijau yang ada.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan daerah aliran sungai yang panjang baik sungai besar maupun sungai kecil atau anak sungai tersebar di semua wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan memprioritaskan pembangunan sarana jalan darat untuk solusi agar dapat menjangkau daerah-daerah yang belum bisa dijangkau melalui sungai, dengan demikian menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah cukup sulit dan juga penyebaran penduduknya tidak merata namun kita menyadari bahwa untuk menikmati pendidikan itu merupakan hak semua orang, dan negara/pemerintah wajib membiayainya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah dengan berbagai pertimbangan, antara lain : *(1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, (4) kemudahan untuk dikelola*, Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak sebagai usia emas (golden age). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mengembangkan sarana dan prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai lembaga PAUD, dan juga yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksimal baru mencapai 68,57% dan perlu ditingkatkan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana PP 38 Tahun 2007 maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 pengelolaan Pendidikan

Anak Usia Dini merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)

Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD/MI/Paket A telah berhasil dengan pencapaian APK 117,59%, namun kualitas pendidikan masih rendah begitu juga ketersediaan sarana prasarana masih belum memadai seperti dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Keadaan Lembaga Pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK Tahun 2015

No	Keadaan Sekolah	Jenjang Pendidikan Tahun 2015			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Sekolah	2.609	788	232	128
2	Jumlah Ruang Kelas	16.693	4.451	1.948	949
3	Ruang Kelas Kondisi Baik	3.842	1.176	1.499	805
4	Ruang Kelas Rusak Ringan	10.596	2.875	287	88
5	Ruang Kelas Rusak Sedang	986	196	89	45
6	Ruang Kelas Rusak Berat	1.269	204	73	11

Sumber Data : Dari Dapodik (Bidang Teknis)

Kemudian yang berkenaan dengan kualitas secara khusus untuk tenaga pendidik SD masih banyak yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

atau dalam rangka peningkatan kualitas dan juga peningkatan/pengembangan kompetensinya, apalagi untuk tenaga pendidik yang berada di daerah terpencil dan sangat terpencil, hal ini juga yang sangat berpengaruh adalah jarak dan biaya, juga berbenturan dengan kewenangan sebagaimana PP 38 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena kewenangan dalam pengelolaan Pendidikan Dasar baik SD maupun SMP merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya ketersediaan, kualitas, Pendidikan Menengah (Dikmen) yang terjangkau adil dan merata

Jenjang Pendidikan Menengah merupakan program strategis yang perlu mendapat perhatian serius, karena harus dipersiapkan secara matang dalam memasuki dunia kerja dan studi lanjut. Dengan banyaknya pengangguran di usia produktif, menjadi tantangan kita dalam menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja, oleh karena itu pembinaan dan peningkatan kompetensi SMK perlu ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dan ketersediaan tenaga pendidik secara khusus untuk tenaga pendidik program keahlian produktif karena Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Tengah belum ada mencetak tenaga pendidik untuk program keahlian produktif untuk Sekolah Menengah Kejuruan, hal ini merupakan tantangan dan peluang dalam pemenuhan tenaga pendidik untuk SMK maka jalan keluarnya dengan melakukan kerjasama dengan semua P4TK di luar Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam pengembangan karier dan kompetensi tenaga pendidik baik yang sudah ada maupun dalam hal pemenuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

Disamping itu pembinaan dan peningkatan SMA juga perlu ditingkatkan khususnya bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK tahun 2015 baru mencapai 83,15%. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih tinggi biaya pendidikan, dan pembangunan jenjang pendidikan menengah SMA/SMK ini masih belum mampu menjangkau sampai ke daerah pedesaan karena selama ini untuk pendidikan menengah hanya sebatas

sampai kepada Ibukota Kecamatan sedangkan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah untuk jarak tempuh dari desa ke Ibukota Kecamatan sangat jauh, dan juga persebaran penduduk yang cukup jarang hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pendidikan menengah baik SMA maupun SMK.

4. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (PLB)

Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian sampai saat ini Sekolah Luar Biasa (SLB) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota maka sarana prasarana SLB sangat kurang, disamping itu juga peran masyarakat perlu ditingkatkan karena kenyataannya masih ada sebagian orang tua yang malu dan tidak mau menyekolahkan anaknya apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini orang tuanya berada di pedesaan dan tingkat perekonomiannya yang lemah, dan memang sangat sulit sekali untuk memperoleh data tentang jumlah penduduk usia sekolah yang mempunyai kebutuhan khusus.

5. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF)

Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada Pelayanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, Penuntasan Buta Aksara dan lain-lain. Program Penuntasan Buta Aksara di Provinsi Kalimantan Tengah cukup menggembirakan karena berdasarkan data penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf mencapai 99,56%, namun masih perlu upaya agar seminimal mungkin jumlah penduduk yang buta aksara. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada Dunia Kerja atau Berwiraswasta, yang perlu mendapat perhatian mengenai tenaga pengajar/tenaga pelatih pada lembaga kursus diupayakan tenaga pengajarnya

mempunyai sertifikat kompetensi, sehingga lulusan atau tamatan dari lembaga tersebut memang betul-betul dapat dijamin tingkat kemampuan dan keterampilannya.

6. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini kualitas pendidik masih rendah khususnya Guru SD/SDLByang berkualifikasi S1/D4 baru mencapai 75,16%, dan tenaga pendidik PAUD baru 51,53%. Untuk itu peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik merupakan hal yang utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah, dari jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar SD dan Pendidikan Menengah SMA/SMK dan SLB.

7. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter

Berdasarkan tayangan pada media elektronik/televisi pada akhir-akhir ini sering dipertontonkan perilaku menyimpang oleh para pelajar, diantaranya : tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang, penganiayaan yang dilakukan oleh kaka kelasnya, dan lain-lain.Hal ini tidak terkecuali baik dari jejang Pendidikan Dasar hingga ke jejang Pendidikan Menengah, sungguh sangatlah memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak yang mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik untuk semua jenjang pendidikan, dan tidak terlepas dari peran orang tua dan masyarakat.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah Visi dan Misi. Perumusan Visi dan Misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah Visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mampu dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai Visi dan Misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan Visi, Misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi.

4.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir periode, Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun. Guna menyelaraskan tugas dan fungsi dengan amanat RPJMD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut:

“TERBENTUKNYA GENERASI CERDAS DAN BERKARAKTER DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, MANDIRI, ADIL, DAN SEJAHTERA MENUJU KALTENG BERKAH”

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di atas memiliki makna :

1. **Generasi Cerdas** adalah membentuk manusia untuk memiliki kesempurnaan akal budinya, baik dalam berpikir, memahami, mengerti, dan lainnya.
2. **Berkarakter** adalah seseorang yang memiliki cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, untuk menuju Kalteng Berkah. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan misi.
3. **Masyarakat Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera** artinya dengan melalui pendidikan maka akan terwujud masyarakat yang cerdas, berkarakter, maka masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dapat maju mandiri, adil dan sejahtera dengan demikian akan terwujud Kalteng Berkah.

4.1.2. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang efektif, dan efisien;
2. Mewujudkan peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merata;
3. Mewujudkan pembinaan karakter unggul berbasis kearifan lokal.

Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien adalah sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna, artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak ada pemborosan sumber daya yang ada seperti uang, waktu dan tenaga. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien apabila pendayagunaan sumber daya seperti tenaga, waktu dan biaya tepat sasaran dengan hasil lulusan berkualitas dan produktifitas yang optimal. Sedangkan pendidikan yang efektif dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Mewujudkan peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merata adalah apabila dalam proses pendidikan semua komponen yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dapat terpenuhi sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan, sedangkan peningkatan akses merupakan upaya yang dilakukan agar semua kelompok masyarakat usia sekolah secara khusus usia pendidikan menengah dapat memiliki kesempatan dan hak yang sama dan berkeadilan dalam memperoleh pendidikan dengan tidak membedakan status dan golongan, dengan demikian semua masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang bermutu hal ini dapat terpenuhi apabila semua unsur berpartisipasi, baik pemerintah, masyarakat dan orang tua dengan demikian akan tercapai pendidikan yang bermutu dan terakses serta merata.
3. Mewujudkan pembinaan karakter unggul berbasis kearifan lokal adalah pembinaan karakter siswa dengan menanamkan jiwa dan kepribadian melalui nilai-nilai kebangsaan dan nilai budaya, misalnya melalui lagu-lagu daerah, tarian daerah dan lain-lainnya dengan demikian tertanam jiwa, jati diri, integritas diri dengan mencintai budaya Indonesia atau budaya lokal sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar, dan diharapkan siswa bangga dengan budaya daerahnya sendidir dalam berkreasi dan berinovasi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran sebagai hal yang utama adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya guna mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 “ ***Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Amanah, Kuat dan Harmonis)***”

A. Tujuan Stategis Pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah :

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus
T2	Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan khusus
T3	Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus
T4	Peningkatan tata kelola pendidikan menengah dan khusus

Penjelasan dari masing-masing tujuan pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. **Tujuan 1: Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus** lima tahun ke depan dipokuskan pada peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus dengan semakin banyaknya keterlibatan siswa di dalam dan di luar kelas secara interaktif sehingga mendorong kreativitas siswa dan daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis, serta dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga pendidik yang sesuai dengan kemajuan jaman dan teknologi,
2. **Tujuan 2 : Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan khusus** diharapkan dalam peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan khusus dengan memperhatikan relevansi, artinya dalam pemilihan pendidikan yang dilaksanakan harus memperhatikan tingkat perkembangan dan keinginan dunia kerja, dunia usaha dan industri, sehingga output atau lulusan dapat bersaing baik di dalam maupun di luar, hal ini perlu dukungan semua unsur baik pemerintah dan masyarakat, stakeholder dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya dan lainnya.
3. **Tujuan 3 : Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus** dimaksudkan agar semua masyarakat usia sekolah secara khusus usia pendidikan menengah dapat menikmati pendidikan yang baik dan bermutu dengan tidak membedakan golongan dan status karena dalam undang-undang semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menikmati pendidikan yang baik dan bermutu dan berkeadilan.
4. **Tujuan 4 : Peningkatan tata kelola pendidikan menengah dan khusus** ini diharapkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu dalam mengembangkan lembaga atau organisasinya secara khusus lembaga pendidikan dengan baik, efisien dan efektif, transparan dengan demikian semua unsur yang ada dalam jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan

Tengah harus diberdayagunakan dengan semaksimal mungkin dan dengan memanfaatkan kompetensi yang berbeda-beda dan semuanya wajib bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, sehingga tuntutan akan pendidikan yang adil, merata dan bermutu dapat tercapai dengan baik demikian juga output daripada pendidikan mempunyai daya saing di masyarakat.

B. Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas belajar;
2. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas kepala sekolah dan guru

Terwujudnya Tujuan 1 (T1) : Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus, ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kualitas belajar	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA tahun 2021 minimal 6,50
		Rata-rata nilai Ujian Nasional SMK tahun 2021 minimal 6,50
SS2	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan	Persentase SMA berakreditasi B tahun 2021 minimal 85,00%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi B tahun 2021 minimal 75,00%
SS3	Meningkatnya kualitas kepala sekolah, guru dan	Persentase guru profesional di SMA/SMK dan SLB tahun 2021 mencapai 97,10%

	pengawas	Persentase kepala sekolah profesional di SMA/SMK dan SLB tahun 2021 mencapai 100%
		Persentase pengawas profesional di SMA/SMK dan SLB tahun 2021 mencapai 80%

Terwujudnya Tujuan 2 (T2) : Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan khusus, ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya Sekolah Menengah Kejuruan yang relevan dengan dunia kerja	Persentase lulusan SMK yang terserap pada dunia usaha dan dunia industri.

Terwujudnya Tujuan 3 (T3) : Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus, ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya layanan pendidikan menengah	Persentase APK SMA dan Paket C
		Persentase APM SMA
		Persentase APK SMK dan Paket C
		Persentase APM SMK
		Persentase Kecamatan memiliki SMA/ SMK
		Persentase Kabupaten memiliki pendidikan SLB

		Angka Putus Sekolah SMA tahun 2021 menurun menjadi 0,06%
		Angka Putus Sekolah SMK tahun 2021 menurun menjadi 0,06%

Terwujudnya Tujuan 4 (T4) : Peningkatan tata kelola pendidikan menengah dan khusus, ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6	Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Baik
		Nilai LAKIP B, mencapai 70,00

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah Daerah Bidang Pendidikan

Visi : Terbentukny Generasi Cerdas dan Berkarakter Dalam Mewujudkan Masyarakat Maju, Mandiri, Adil, Dan Sejahtera Menuju Kalteng Berkah.											
Misi : 1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang efektif, dan efisien; 2. Mewujudkan peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merata; 3. Mewujudkan pembinaan karakter unggul berbasis kearifan lokal.											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Target Akhir Tahun 2021
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus	1. Peningkatnya kualitas belajar	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA	5,00	5,00	5,50	5,60	5,70	5,80	6,50	6,50
			Rata-rata nilai ujian Nasional SMK	5,00	5,00	5,50	5,60	5,70	5,80	6,50	6,50
		2. Peningkatkan kualitas lembaga pendidikan	Persentase SMA berakreditasi minimal B	61,00	62,00	66,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
				36,00	37,00	45,00	55,00	65,00	70,00	75,00	75,00

			Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B								
		3.	Peningkatnya kualitas kepala sekolah, guru dan pengawas	95,00	95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	97,10	97,10
			Persentase guru profesional di SMA, SMK dan SLB								
			Persentase kepala sekolah profesional di SMA, SMK dan SLB	74,50	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
			Persentase pengawas profesional di SMA, SMK dan SLB	58,00	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	80,00	80,00
2	Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah dan khusus	Meningkatnya Sekolah Menengah Kejuruan yang relevan dengan dunia kerja	Persentase lulusan SMK yang terserap pada dunia usaha/industri	19,00	20,15	20,40	21,10	21,75	22,00	23,25	23,35
3	Peningkatan akses pendidikan menengah dan	Meningkatnya layanan pendidikan menengah	Persentase APK SMA dan Paket C	83,15	85,53	87,91	90,29	92,67	95,05	97,43	97,43

	khusus										
			Persentase APM SMA	77,50	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,62	77,62
			Persentase APK SMK dan Paket C	83,15	85,53	87,91	90,29	92,67	95,05	97,43	97,43
			Persentase APM SMK	77,50	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,62	77,62
			Persentase Kecamatan memiliki SMA/SMK	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Kabupaten memiliki SLB	92,31	92,31	92,31	92,31	92,31	100,00	100,00	100,00
			Angka Putus Sekolah SMA	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60
			Angka Putus Sekolah SMK	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60
4	Peningkatan tata kelola pendidikan menengah dan khusus	Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan	Laporan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Nilai LAKIP minimal B	52,22	55,18	58,14	61,10	64,06	67,02	70,00	70,00

Tabel 4.2
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021
Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan

Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Pelayanan Pendidikan menengah dan SLB yang terjangkau relevan dan berkualitas.	1 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Guru, Pendidikan Menengah dan SLB		X	X	X	X	X
		2 Pengoptimalan Tata Kelola Pendidikan Menengah dan SLB		X	X	X	X	X
		3 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan SLB		X	X	X	X	X
		4 Peningkatan Kualitas Pengawas SMA/SMK dan SLB		X	X	X	X	X
		5 Peningkatan Kualitas Lulusan SMA/SMK/SLB		X	X	X	X	X

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Strategi :

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- Peningkatan Pelayanan Pendidikan Menengah dan SLB yang terjangkau, relevan dan berkualitas.

2. Kebijakan :

Arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah periode Renstra 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Guru, Pendidikan Menengah
2. Pengoptimalan Tata Kelola Pendidikan Menengah dan SLB
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan SLB
4. Peningkatan Kualitas Pengawas SMA/SMK dan SLB
5. Peningkatan Kualitas Lulusan SMA/SMK/SLB.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Bidang Pendidikan

NO	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN		PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN	
1	Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus	Meningkatnya kualitas belajar	1. Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, ketenagaan dan lain-lain jenjang SMA	Peningkatan keterpenuhan sarana dan psasaran sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan	Program Pendidikan SMA
			2. Rata-rata nilai Ujian Nasional SMK	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, ketenagaan dan lain-lain jenjang SMK	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, ketenagaan dan lain-lain jenjang SMK	Program Pendidikan SMK
		Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan	1. Persentase SMA berakreditasi minimal B	Dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan) tingkat SMA	Pengadaan sarana dan prasaran penunjang proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan	Program Pendidikan SMA

			2. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	Dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan) tingkat SMA	Pengadaan sarana dan prasaran penunjang dan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan	Program Pendidikan SMK
		Meningkatnya kualitas kepala sekolah, guru dan pengawas	1. Persentase guru profesional di SMA/SMK dan SLB	Melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru	Pendidikan dan pelatihan guru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	2. Persentase kepala sekolah profesional di SMA/SMK dan SLB		Melakukan peningkatan kompetensi kepala sekolah	Pendidikan dan pelatihan keala sekolah		
	3. Persentase pengawas profesional di SMA/SMK dan SLB		Melakukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah	Pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah		
2	Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan	Meningkatnya Sekolah Menengah Kejuruan yang relevan dengan dunia kerja	Persentase lulusan SMK yang terserap pada dunia kerja	Pemenuhan sarana penunjang proses belajar mengajar di SMK	Pengadaan peralatan praktik dan bahan praktik siswa, serta penyesuaian	Program Pendidikan SMK

	menengah dan khusus				program keahlian dengan kebutuhan pasar kerja	
3	Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Meningkatnya layanan pendidikan menengah	Persentase APK SMA dan Paket C	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan SMA	Pembangunan Unit Gedung Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan, Laboratorium dan Sarana Pendidikan SMA	Program Pendidikan SMA
			Persentase APM SMA	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan SMA	Pembangunan Unit Gedung Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan, Laboratorium dan Sarana Pendidikan SMA	Program Pendidikan SMA
			Persentase APK SMK dan Paket C	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan SMK	Pembangunan Unit Gedung Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan, Laboratorium dan Sarana Pendidikan SMK	Program Pendidikan SMK
			Persentase APM SMK	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan SMK	Pembangunan Unit Gedung Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan, Laboratorium dan Sarana	Program Pendidikan SMK

					Pendidikan SMK	
			Persentase Kecamatan memiliki SMA/SMK	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan SMA/SMK	Pembangunan Unit Gedung Baru SMA/SMK pada kecamatan yang belum ada SMA/SMK	Program Pendidikan SMA Program Pendidikan SMK
			Persentase Kabupaten memiliki SLB	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan SLB	Pembangunan Gedung Baru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pengadaan sarana penunjang lainnya	Program Pendidikan Luar Biasa
			Angka Putus Sekolah SMA	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan SMK	Pembangunan Gedung Sekolah, Pembangunan RKB, Perpustakaan. Laboratorium dan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA	Program Pendidikan SMA
			Angka Putus Sekolah SMK	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan SMK	Pembangunan Gedung Sekolah, Pembangunan RKB, Perpustakaan,	Program Pendidikan SMK

					Laboratorium dan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK	
4	Peningkatan tata kelola pendidikan menengah dan khusus	Meningkatnya tata kelola yang baik Dinas Pendidikan	- Laporan Keuangan dan Aset Baik - LAKIP Nilai Baik	Pemberdayaan Sumber Daya yang ada dengan efektif dan efisien	Pendayagunaan Sumber Daya yang ada sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing dengan baik, efektif dan efisien.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. V

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021, meliputi **program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif**. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. **Pertama**, program dan kegiatan teknis yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. **Kedua**, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. **Ketiga**, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan, adapun program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 merupakan program dan kegiatan yang sudah dibahas pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017-2021 tentunya ada mengalami penambahan dan pengurangan serta penyempurnaan baik program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan program dan kebijakan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU 23 Tahun 2014 bahwa mulai tahun 2017 pengelolaan pendidikan menengah dan luar biasa merupakan kewenangan pemerintah provinsi maka oleh karena itu pasti ada banyak yang berubah dari kegiatan Tahun Anggaran 2016, adapun kegiatan dan program dibawah ini merupakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017– 2021 sebagai berikut :

1. Program Pendidikan SMA (01.17)

Program Pendidikan SMA terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Penyediaan makan dan minum Siswa SMAN-5 Palangka Raya.
- Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Debat Bahasa Inggris, Olimpiade Sains, dan Olahraga Siswa SMA.
- Lomba Bahasa Indonesia siswa SMA.
- Olimpiade Sains Nasional Guru SMA.
- Pelatihan Pembinaan OSIS dan LDK Siswa SMA Tingkat Provinsi.
- Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Tingkat Provinsi.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Administrasi Pengelolaan dan Monitoring pemberian Honorarium Guru Honor SMA.
- Review Program Kerja BOS Daerah SMA.
- Administrasi dan Seleksi Guru non PNS SMA Penerima Insentif.
- Festival Lomba-lomba dan Olimpiade Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten/Kota.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).
- Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Negeri (DAK Non Fisik)
- Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMA
- Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMA
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMA

2. Program Pendidikan SMK (01.18)

Program Pendidikan SMK terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Lomba Keterampilan Siswa SMK.
- Gelar Prestasi Siswa SMK Tingkat Provinsi.
- Pelaksanaan Unjain Kompetensi Siswa SMK.
- Olimpiade Sains Nasional Guru SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembangunan Ruang Kelas Bari.
- Pengadaan Meubelair Sekolah.
- Jambore Karakter dan KKP Siswa SMK Tingkat Provinsi.
- Gelar Prestasi Karya Tulis Kompetensi Keahlian Siswa SMK Tingkat Provinsi.
- Produk Unggulan Inovasi Karya Siswa SMK.

- Review Program Kerja dan Sosialisasi BOS Daerah SMK.
- Pelatihan dan Pengelolaan Manajemen Dapodik SMK.
- Re-engineering Paket Keahlian SMK.
- Olimpiade dan Lomba-lomba Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten/Kota.
- Pembangunan Ruang Asrama.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (DAK Non Fisik)
- Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK
- Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMK
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMK

3. Program Pendidikan Luar Biasa (01.20)

Program pendidikan luar biasa terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Gebyar PK-PLK.
- Festival dan Lomba-lomba PK-PLK.
- Pencetakan Raport.
- Bimtek Dapodik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- Seleksi kepala sekolah, Pengawas dan Guru SLB Berprestasi.
- Penjaringan Data Anak Berkebutuhan Khusus.
-

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (01.21)

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Peningkatan pelayanan dan pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK).
- Bimbingan teknis pembinaan guru KKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota se Kalimantan Tengah.
- Pembinaan Supervisi Manajerial dan Akademik.
- Forum Ilmiah Guru tingkat Provinsi dan Nasional.
- Diklat supervisi dan evaluasi akademik bagi pengawas sekolah

5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (01.22)

Program Pengembangan Budaya Baca terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (01.23)

Program dukungan manajemen pelaksanaan pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Rapat koordinasi perencanaan pendidikan provinsi Kalimantan Tengah.
- Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Nasional.
- Pendataan Peserta Ujian Nasional.
- Pengemasan dan pendistribusian bahan/soal ujian nasional.
- Pemantauan pelaksanaan ujian nasional.
- Konsultasi dan Koordinasi ujian nasional.
- Peningkatan Peran Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Gebyar Pendidikan
- Rapat koordinasi dan evaluasi ujian nasional.
- Rapat kerja pendidikan.
- Ekspose Kegiatan Pendidikan.
- Pendataan Ujian Nasional Berbasis WEB se Kalimantan Tengah.
- Rapat teknis penyusunan kalender pendidikan Kalimantan Tengah.
- Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan.
- Penyediaan bahan bacaan media cetak dan media elektronik dan publikasi bidang pendidikan.
- Pengelolaan Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tim Manajemen BOS Pendidikan Menengah.
- Rapat Koordinasi Akreditasi SMA dan SMK.
- Pengelolaan administrasi GTT Agama dan Penjaskes.
- Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

7. Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan (01.26)

Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Bimtek integrasi TIK dalam pembelajaran.
- Pelatihan pengembangan konten bahan belajar berbasis website.
- Pelatihan sistem instruksional/pembelajaran.
- Pengembangan data center BTKIP.

- Kuis Kihajar berbasis TIK.
- TOT ICT bagi guru pembina OSN komputer.
- Pelatihan Proktor dan teknisi untuk pelaksanaan UN CBT pendidikan menengah se Kalimantan Tengah.

8. Program Pengembangan Pendidikan Karakter (01.34)

Program Pengembangan Pendidikan Karakter terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Pembinaan Lomba UKS, Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi dan Nasional.
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Provinsi.
- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi.
- Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD Tingkat Provinsi.
- Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD tingkat Provinsi.
- Cerdas Cermat UUD Negara RI tahun 1945 tingkat SLTA Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan (01.35)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Layanan Mobil Cerdas.
- Monitoring Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan.
- Pelayanan Pemanfaatan Rumah Pintar.
- Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) Paket A/ULA
- Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Skala Provinsi.
- Penyusunan Soal Ujian SD/MI Tingkat Provinsi Kalteng.
- Pencetakan SKHUS SDLB sederajat.
- Pencetakan Soal Ujian Sekolah SDLB sederajat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pengelolaan Administrasi kegiatan BAP PAUD dan PNF
- Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD.
- Administrasi Pengelolaan BOS SD dan SMP Tingkat Provinsi.
- Rapat Koordinasi Pengawas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SLB se Kalimantan Tengah.
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Bos SD dan SMP Tingkat Provinsi

Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Peralatan rumah tangga.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makan dan minum.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Pengembangan data dalam Perencanaan Bidang Pendidikan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Pengadaan peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (01.03)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (01.05)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun.
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan.
- Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan.
- Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja bidang Pendidikan.
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan.
- Penyusunan Program Kerja Bidang Pendidikan.
- Penyusunan RKA-SKPD Bidang Pendidikan.
- Penyusunan LAKIP.
- Evaluasi Percepatan Penguatan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2K-APBD).
- Penyusunan Profil Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Strategis

Sasaran	1. Menigkatnya kualitas belajar 2. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan 3. Meningkatkan layanan pendidikan menengah			
No.	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
St. 1. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Merata				
1.	Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.	01.17. Program Pendidikan SMA	- APM SMA	
2.			- APK SMA dan Paket C	
3.			- Persentase SMA berakreditasi minimal B	
			- Angka Putus Sekolah SMA	
			- Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA	
			- Persentase Kecamatan Memiliki SMA	
		17.61	Penyediaan makan dan minum Sekolah Unggulan Provinsi SMAN-5 Palangka Raya	Jumlah siswa SMAN-5 Palangka Raya disediakan makan dan minum
		17.70	Festival Lomba Senis Siswa Nasional (FLS2N), Debat Bahasa Inggris, Olimpiade Sains, dan Olahraga Siswa SMA	Jumlah peserta FLS2N, Debat Bahasa Inggris, Olimpiade Sains dan Olah Raga
		17.94	Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA	Jumlah peserta Lomba Bahasa Indonesia SMA
		17.95	Olimpiade Sains Nasional Guru SMA	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional Guru SMA
	17.123	Pelatihan Pembinaan OSIS dan LDK Siswa SMA Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Pelatihan Pembinaan OSIS dan LDK SMA	
	17.192	Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Tingkat Provinsi	Jumlah siswa SMA peserta Pelatihan Jurnalistik	
	17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	

		17.194	Administrasi Pengelolaan dan Monitoring dan pemberian Honorarium Guru Honor SMA	Dokumen laporan hasil monitoring
		17.195	Review Program Kerja BOS Daerah SMA	Jumlah peserta Review Program Kerja BOS Daerah SMA
		17.196	Administrasi dan Seleksi Guru Non PNS SMA Penerima Insentif	Dokumen Hasil Seleksi Guru Non PNS SMA penerima Insentif
		17.197	Festival, Lomba-lomba dan Olimpiade jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten/Kota	Jumlah peserta SMA Peserta Festival, Lomba-lomba tingkat Kabupaten/Kota
		17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang diadakan Meubelair
		17.199	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Negeri (DAK Non Fisik)	Jumlah Siswa SMAN Penerima BOS (DAK) Non Fisik
		17.204	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMA	Jumlah peserta Sosialisasi DAK Fisik SMA
		17.205	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMA	Jumlah peserta Sosialisasi DAK Non Fisik SMA
		17.206	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMA	Jumlah Laporan
Sasaran	1. Menigkatnya kualitas belajar 2. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan 3. Meningkatnya Sekolah Menengah Kejuruan yang relevan dengan dunia kerja 4. Meningkatnya layanan sekolah menengah			
	St. : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas, Merata dan Relevan			
1.	Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan yang Berkualitas.	01.18. Program Pendidikan SMK		- APM SMK
2.	Peningkatan Pemenuhan Sarana Penunjang Proses Pendidikan.			- APK SMK dan Paket C
3.	Peningkatan Kualitas Pendidikan			Psentase Paket Keahlian SMK berakreditasi maksimal B
				- Angka Siswa Putus Sekolah di SMK
				- Rata-rata nilai UN SMK

		- Persentase lulusan SMK terserap pada Dunia Usaha/Industri
		- Persentase Kecamatan Memiliki SMK
	18.01	Lomba Keterampilan Siswa SMK Jumlah peserta Lomba Keterampilan Siswa SMK
	18.02	Gelar Prestasi Siswa SMK Tingkat Provinsi Jumlah peserta Gelar Prestasi Siswa SMK
	18.03	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa SMK Jumlah peserta Ujian Kompetensi Siswa SMK
	18.04	Olimpiade Sains Nasional Guru SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional Guru SMK
	18.05	Pembangunan Ruang Kelasa Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
	18.06	Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah Sekolah yang diadakan Meubelairnya
	18.07	Jambore Karakter dan KKP Siswa SMK Tingkat Provinsi Jumlah peserta Jambore dan KKP Siswa SMK
	18.08	Gelar Prestasi Karya Tulis Kompetensi Keahlian Siswa SMK Tingkat Provinsi Jumlah peserta Gelar Prestasi Karya Tulis Kompetensi Keahlian Siswa SMK
	18.09	Produk Unggulan Inovasi Karya Siswa Jumlah Produk Unggulan Inovasi Karya Siswa SMK
	18.10	Review Program Kerja dan Sosialisasi BOS Daerah SMK Jumlah peserta review Program Kerja BOS Daerah SMK
	18.11	Pelatihan dan Pengelolaan Manajemen Dapodik SMK Jumlah peserta Pelatihan pengelolaan Manajemen Dapodik SMK
	18.12	Re-engineering Paket Keahlian SMK Jumlah peserta re-engineering Paket Keahlian SMK
	18.13	Olimpiade dan Lomba-lomba Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di abupaten/Kota Jumlah SMK peserta Lomba-loba tingkat Kabupaten/Kota
	18.14	Pembangunan Ruang Asrama Jumlah Ruang Asrama SMK yang dibangun
	18.15	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri DAK Non Fisik Jumlah Siswa penerima BOS SMKN DAK Non Fisik
	18.20	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jumlah peserta Sosialisasi DAK Fisik SMK

		SMK	
		18.21 Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMK	Jumlah peserta Sosialisasi DAK Non Fisik SMK
		18.22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMK	Jumlah Laporan
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas belajar. 2. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan. 3. Meningkatnya kualitas kepala sekolah, guru dan pengawas.		
St : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas			
1. Peningkatan Pemenuhan Sarana Penunjang Proses Pendidikan. 2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01.20. Program Pendidikan Luar Biasa		- Persentase SDLB berakreditasi minimal B
			- Persentase SMPLB berakreditasi minimal B
			- Persentase SMALB berakreditasi minimal B
			- Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMPLB
			- Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMALB
	20.59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Jumlah peserta monitoring dan Evaluasi
	20.64	Gebyar PK dan PLK.	Jumlah Peserta Gebyar PK-PLK
	20.86	Festival dan Lomba-Lomba PK-PLK	Jumlah peserta Festival dan Lomba PK-PLK
	20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Jumlah Paket Alat Keterampilan yang diadakan
	20.104	Pencetakan Raport	Jumlah raport yang dicetak
	20.106 Bimtek Dapodik Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah Peserta Bimtek Dapodik PK-PLK	
	20.107 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SLB Berprestasi	Jumlah Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SLB berprestasi mengikuti seleksi	
	20.108 Penjaringan Data Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Peserta Penjaringan data anak berkebutuhan khusus	
Sasaran	• Meningkatnya kualitas kepala sekolah, guru dan pengawas		
St. : Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Luar Biasa			
1.	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan.	01.21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Guru PLB berkualifikasi minimal S1/D4

			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Guru SMA berkualifikasi minimal S1/D4 - Persentase Guru SMK berkualifikasi minimal S1/D4 - Persentase Kepala Sekolah Profesional di SMA - Persentase Kepala Sekolah Profesional di SMK - Persentase Pengawas Profesional di SMA/SMK dan SLB
		21.24 Peningkatan pelayanan dan pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK).	Jumlah Guru yang ditetapkan PAK
		21.33 Bimbingan teknis pembinaan guru KKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota se Kalimantan Tengah.	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru KKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPS
		21.65 Pembinaan supervise manajerial dan akademik	Jumlah peserta Pembinaan Supervisi Manajerial Akademin
		21.135 Diklat supervise dan evaluasi akademik bagi pengawas sekolah	Jumlah peserta Diklat Supervisi akademik bagi pengawas sekolah
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas belajar.		
St : Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik di Perpustakaan Sekolah.			
1.	Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan Sekolah.	01.22. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Persentase Melek Huruf
		22.18 Sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah	Jumlah peserta sosialisasi Gerakan Literasi di Sekolah
Sasaran	• Meningkatnya tata kelola pendidikan menengah dan khusus		
St : Meningkatkan pemberdayaan sumber daya yang ada dan peningkatan kualitas laporan keuangan, aset dan perencanaan			
1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan, aset dan perencanaan	01.23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		23.13 Rapat koordinasi perencanaan pendidikan provinsi Kalimantan Tengah.	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan
		23.19 Sosialisasi pelaksanaan ujian nasional.	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional

		23.20	Pendataan peserta ujian nasional.	Jumlah peserta Pendataan Peserta Ujian Nasional
		23.21	Pengepakan dan pendistribusian bahan/soal ujian nasional.	Jumlah Dokumen Bahan/Soal Ujian Nasional
		23.22	Pemantauan pelaksanaan ujian nasional.	Jumlah peserta Pemantauan Pelaksanaan Ujian Nasional
		23.23	Konsultasi dan koordinasi ujian nasional.	Jumlah peserta konsultasi dan koordinasi ujian nasional
		23.32	Peningkatan Peran Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Dewan Pendidikan
		23.34	Gebyar Pendidikan	Jumlah peserta Gebyar Pendidikan
		23.44	Rapat koordinasi dan evaluasi ujian nasional.	Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi ujian nasional
		23.46	Rapat kerja pendidikan.	Jumlah peserta Rapat Kerja Pendidikan
		23.49	Ekspose Kegiatan Pendidikan.	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan
		23.50	Pendataan Ujian Nasional Berbasis WEB se Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Pendataan Ujian Nasional Berbasis WEB
		23.51	Rapat Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Rapat teknis Penyusunan Kalender Pendidikan
		23.52	Penyelenggaraan Unjian Nasional Kesetaraan	Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan
		23.53	Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kesetaraan	Jumlah peserta Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kesetaraan
		23.54	Penyediaan bahan bacaan media cetak dan media elektronik dan publikasi bidang pendidikan	Tersedianya Bahan Bacaraan melalui media cetak, media elektronik
		23.57	Tim Manajemen BOS Pendidikan Menengah	Jumlah peserta Tim Manajemen BOS Pendidikan Menengah

		23.58	Rapat Koordinasi Akreditasi SMA dan SMK	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Akreditasi SMA dan SMK
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas belajar 2. Meningkatnya kualitas kepala sekolah, guru dan pengawas			
St : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dalam pemanfaatan ICT, dalam proses pembelajaran				
1. 2.	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam penguasaan ICT dalam proses belajar mengajar Meningkatkan kemampuan siswa dalam pemanfaatan ICT dalam belajar.	10.26. Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan		- Persentase Pendidik SMA/SMK yang mampu menggunakan ICT dalam Pembelajaran
				- Jumlah Model Bahan Ajar berbasis TIK di SMA/SMK
		26.02	Bimtek integrasi TIK dalam pembelajaran.	Jumlah peserta Bimtek integrasi TIK dalam pembelajaran.
		26.04	Pelatihan pengembangan konten bahan belajar berbasis website.	Jumlah peserta Pelatihan pengembangan konten bahan belajar berbasis website.
		26.07	Pelatihan sistem instruksional/pembelajaran.	Jumlah peserta Pelatihan sistem instruksional/pembelajaran.
		26.11	Pengembangan Perluasan dan Pembinaan Sekolah Rintisan Berbasis TIK	Jumlah peserta pembinaan Sekolah Rintisan Berbasis TIK
		26.20	Pengembangan data center BTKIP.	Terlaksananya pengembangan data center BTKIP
			26.25	Kuis Ki Hajar berbasis TIK.
		26.35	TOT ICT bagi guru pembina OSN Komputer	Jumlah peserta TOT ICT bagi guru pembina OSN Komputer
		26.37	Pelatihan Proktor dan teknisis untuk pelaksanaan UN CBT pendidikan menengah se-Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Pelatihan Proktor dan teknisis untuk pelaksanaan UN CBT pendidikan menengah se-Kalimantan Tengah
Sasaran	Meningkatnya kualitas belajar pendidikan			
St : Meningkatkan kualitas karakter peserta didik pada semua jenis dan jenjang pendidikan dalam belajar.				

1	Menanamkan sikap kejujuran dan kedisiplinan peserta didik melalui bermacam-macam Lomba/Olimpiade	01.34. Program Pengembangan Pendidikan Karakter	- Persentase Sekolah mengikuti lomba-lomba dan Olimpiade
		34.03 Pembinaan Lomba UKS, Olimpiade Sains, Porseni, dan Sastra Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Pembinaan Lomba UKS, Olimpiade Sains, Porseni, dan Sastra Tingkat Provinsi dan Nasional
		34.04 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Parovinsi	Jumlah peserta Olimpiade Sains Guru SMP/MTs Tingkat Provinsi
		34.05 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi
		34.06 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD Tingkat Provinsi
		34.07 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Provinsi
		34.11 Cerdas Cermat UUD Negara RI tahun 1945 tingkat SLTA Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Cerdas Cermat UUD Negara RI Tahun 1945 tingkat SLTA Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan		
St : Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan, Kebijakan antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota			
1.	Meningkatnya Koordinas Pengelolaan Pendidikan	01.35. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan	- Jumlah pelaksanaan fasilitasi bidang pendidikan
		35.24 Layanan Mobil Cerdas	Jumlah Mobil Cerdas
		35.30 Monitoring Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan	Jumlah peserta Monitoring Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan

		35.32	Pelayanan Pemanfaatan Rumah Pintar	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Rumah Pintar
		35.38	Penggandaan Soal Ujian sekolah (US) Paket A/ULA	Jumlah Dokumen Soal Ujian sekolah (US) Paket A/ULA yang digandakan
		35.39	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Skala Provinsi	Jumlah Sekolah SD/MI peserta Ujian Sekolah Skala Provinsi
		35.40	Penyusunan Soal Ujian Sekolah SD/MI Tingkat Provinsi Kalteng	Jumlah Peserta Penyusunan Soal Ujian Sekolah SDLB sederajat
		35.41	Pencetakan SKHUS SDLB sederajat	Jumlah SKHUS yang dicetak
		35.42	Pencetaan Soal Ujian Sekolah SDLB sederajat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Soal Ujian Sekolah SDLB sederajat yang dicetak
		35.43	Pengelolaan Administrasi Kegiatan BAP PAUD dan PNF	Jumlah peserta Pengelola Administrasi BAP PAUD dan PNF
		35.44	Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD	Jumlah peserta Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD
		35.45	Adminstrasi Pengelolaan BOS SD dan SMP Tingkat Provinsi	Dokumen Administrasi BOS SD dan SMP
		35.46	Rapat Koordinasi Pengelolaan BOS SD dan SMP Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan BOS SD dan SMK Tingkat Provinsi

5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indiktif.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun mendatang yang berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja, terdapat pada table 5.2, dan program yang menunjang tatakelola Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 5.3 di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB. VI

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan

dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Pendidikan.

Pada periode Renstra Tahun 2010-2015 untuk menghitung pencapaian kinerja dalam pengelolaan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar adalah SD/MI/Paket A, dan untuk jenjang pendidikan menengah pertama adalah SMP/MTs/Paket B, dan untuk jenjang pendidikan menengah atas adalah SMA/MA/SMK/Paket C. Sebagaimana diketahui dan juga sesuai dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019 bahwa untuk perhitungan kinerja secara khusus untuk APK/AMP yang dihitung adalah yang dibawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMALB/SMK/Paket C, sedangkan untuk MI/MTs dan MA pengelolaannya dibawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka untuk itu dalam menghitung capaian kinerja untuk capaian APK/APM dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah adalah SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket dan SMA/SMK/Paket C. Bila dilihat dari proporsi jumlah lembaga pendidikan dan jumlah siswa yang ada di MI/MTs, dan MA, berkontribusi untuk pencapaian APK/APM pada tahun 2014 yaitu : Untuk MI berkontribusi sebesar $\pm 12\%$, untuk MTs berkontribusi sebesar $\pm 12\%$ serta untuk MA berkontribusi sebesar $\pm 11\%$, maka oleh karena itu untuk perhitungan capaian APK/APM jenjang Sekolah Dasar (SD/SDLB/Paket A), jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B) dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/Paket C), capaian tahun 2014 dikurangi dengan kontribusi MI/MTs/MA, karena berdasarkan capaian tahun 2015 inilah merupakan acuan untuk menargetkan capaian untuk selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu periode Renstra Tahun 2016-2021, sebagaimana pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2016-2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
I	Program Pendidikan SMA								
1.	APM SMA	77,50	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,62	77,62
2.	APK SMA dan Paket C	83,15	85,53	87,91	90,29	92,67	95,05	97,43	97,43
3.	Angka Putus Sekolah SMA	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60
4.	Persentase SMA berakreditasi minimal B	61,00	62,00	66,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
6.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA	5,00	5,00	5,50	5,60	5,70	5,80	6,50	6,50
II	Program Pendidikan SMK								
1.	APM SMK	77,50	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,62	77,62
2.	APK SMK dan Paket C	83,15	85,53	87,91	90,29	92,67	95,05	97,43	97,43
3.	Angka Putus Sekolah SMK	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60
4.	Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B	61,00	62,00	66,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
6.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA	5,00	5,00	5,50	5,60	5,70	5,80	6,50	6,50
III.	Pendidikan Luar Biasa								
1.	Persentase SLB berakreditasi minimal B	38,80	38,82	50,00	60,00	70,00	75,50	77,00	77,00
4.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMLB	5,40	5,50	5,60	5,70	5,75	5,80	6,50	6,50
5.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMALB	5,40	5,50	5,60	5,70	5,75	5,80	6,50	6,50
IV.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								

DINAS PENDIDIKAN
 P R O V I N S I KALIMANTAN TENGAH, Renstra 2016-2021

1.	Persentase Guru PLB berkualifikasi minimal S1/D4	93,50	93,71	93,76	93,86	94,06	94,36	95,00	95,00
2.	Persentase Guru SMA berkualifikasi minimal S1/D4	92,53	92,75	93,45	93,80	94,75	95,65	96,75	96,75
3.	Persentase Guru SMK berkualifikasi minimal S1/D4	92,53	92,75	93,45	93,80	94,75	95,65	96,75	96,75
4.	Persentase Guru Profesional di SMA	95,00	95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	97,10	97,10
5.	Persentase Guru Profesional di SMK	95,00	95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	97,10	97,10
6.	Persentase Guru Profesional di SLB	95,00	95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	97,10	97,10
V.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
1.	Angka Melek Huruf	97,00	97,20	97,80	98,60	98,90	99,20	99,80	99,80
VI.	Manajemen Pelayanan Pendidikan								
1.	Laporan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	LAKIP Dinas Pendidikan B	52,22	59,15	60,80	63,70	65,80	67,60	70,00	70,00
VII	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pendidikan								
1.	Persentase Pendidik SMA dan SMK yang mampu menggunakan ICT dalam Pembelajaran Kependidikan	60,00	60,30	60,70	61,30	62,00	62,70	64,30	64,30
2.	Jumlah Model Bahan Ajar berbasis TIK	3	4	5	6	7	9	10	10

Tabel 6.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah yang Berkualitas serta Meningkatnya Mutu Lulusan	1. Menurunnya Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah (SMA/SMK)	Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah Menurun pada tahun 2021 sekurang-kurangnya 0,06 %
		2. Persentase Kelulusan dan Rata-rata Nilai UN SMA dan SMK	Jumlah Kelulusan meningkat dan Rata-Rata Nilai UN pada tahun 2021 untuk SMA 6,50. dan SMK 6,50.
2.	Terlaksananya Proses Pendidikan Yang Menerapkan Standar Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Persentase Lulusan SMK terserap pada Dunia Usaha/Industri	Jumlah siswa lulusan SMK terserap pada Dunia Usaha/Industri tahun 2021 mencapai 23,25%
3.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Rata-rata nilai Ujian SLB	Rata-rata Nilai Ujian SLB tahun 2021 mencapai 6,50%
4.	Meningkatnya Pengembangan ICT dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Administrasi Sekolah	Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mampu Menggunakan ICT dalam Pembelajaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SMA/SMK yang mampu menggunakan ICT dalam Proses Pembelajaran dan Administrasi Sekolah sebanyak 64,30%
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya pemberdayaan sumber daya manusia yang ada dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 5 Dokumen

PENUTUP

BAB. VII

7.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 di bidang pendidikan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan Kalimantan Tengah selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengedepankannya, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara

tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mencerdaskan masyarakat.

7.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2021, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 berakhir pada bulan Desember 2020, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2020. Oleh karena itu dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Renstra

menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Pendidikan;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Pendidikan;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui Renja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah per-triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pendidikan.
7. Dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Pendidikan memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Pendidikan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Pendidikan jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.